



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pasal 335 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, telah dilakukan penyusunan peta jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang memuat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;



- b. bahwa dalam penentuan kelas jabatan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/233/M.SM.04.00/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu adanya pengaturan kembali kelas jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);



3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 261);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.



Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Menko Polhukam, adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
2. Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.



6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan serta menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi, yang terdiri atas:
 1. jabatan pimpinan tinggi madya; dan
 2. jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Jabatan Administrasi, yang terdiri atas:
 1. jabatan administrator;
 2. jabatan pengawas; dan
 3. jabatan pelaksana;



c. Jabatan Fungsional.

- (3) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat jabatan lainnya di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam Peta Jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Informasi Jabatan dari Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 5

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan untuk Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 3 September 2018.



Pasal 7

Nama pejabat pemangku Jabatan yang memiliki Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8

- (1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat administrasi didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan dan/atau alih tugas dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi.
- (2) Kelas Jabatan bagi Pejabat Fungsional didasarkan pada:
 - a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional;
 - b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional;
 - c. keputusan terkait penyesuaian/*inpassing*;
 - d. keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi; atau
 - e. keputusan terkait perpindahan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Selain menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga diberikan tunjangan kinerja setiap bulannya.



Pasal 10

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 12

Ketentuan teknis pemberian tunjangan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dinyatakan masih mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan



Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1609).

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-10/MENKO/POLHUKAM/10/2012 tentang Nama Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
- b. ketentuan mengenai Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1609),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1240

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Sidiq Mustofa

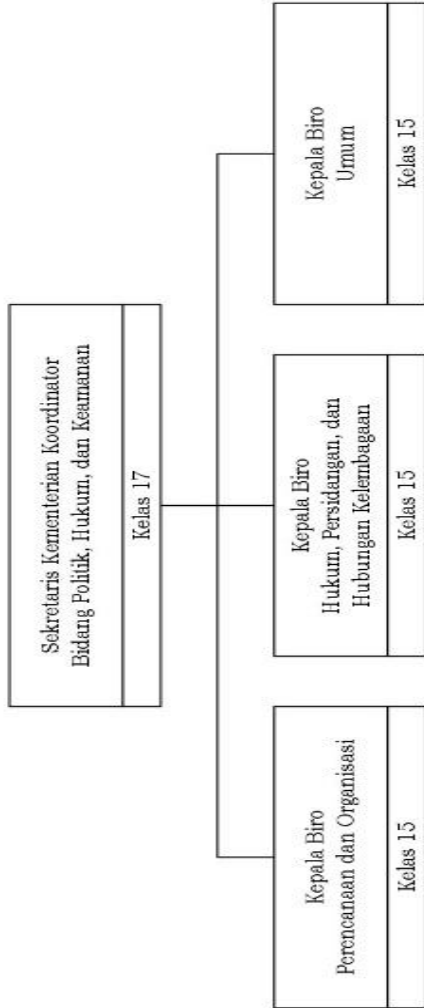




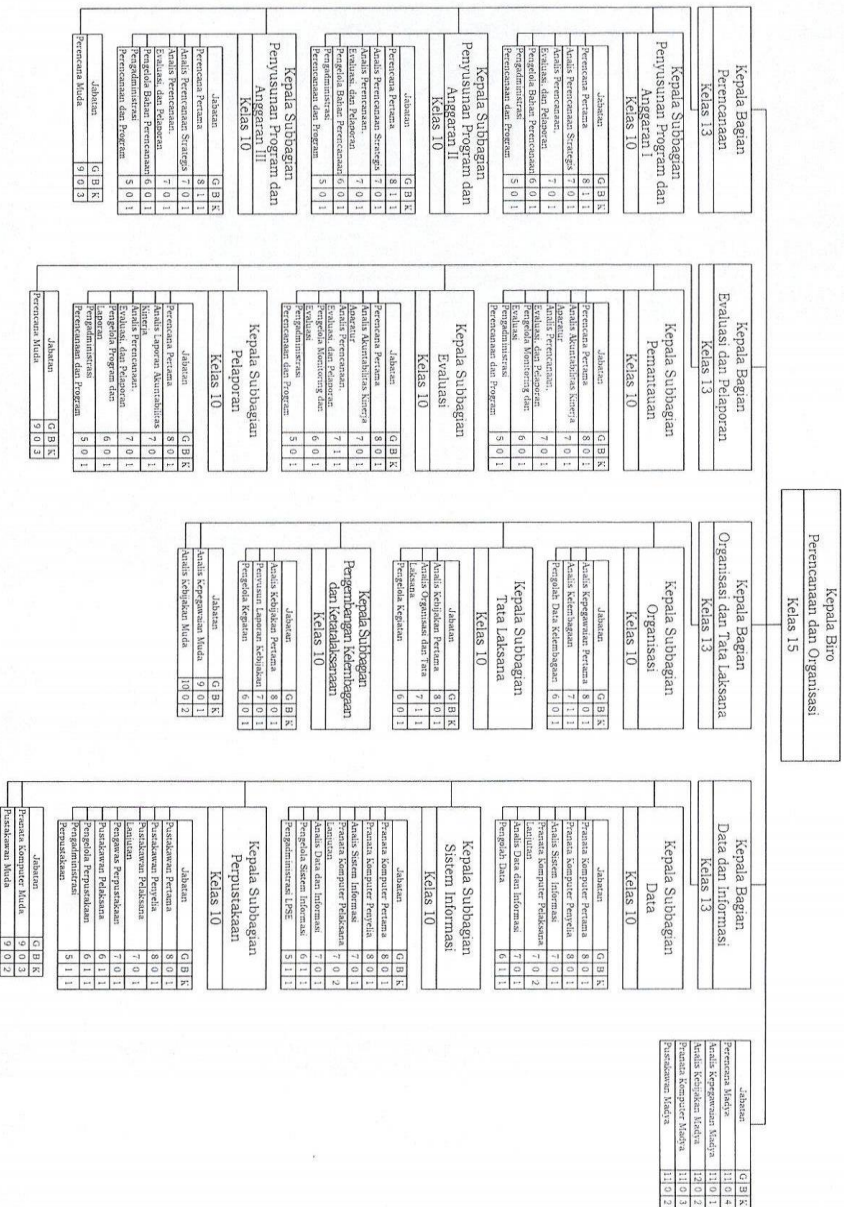
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

PETA JABATAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

1. Peta Jabatan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

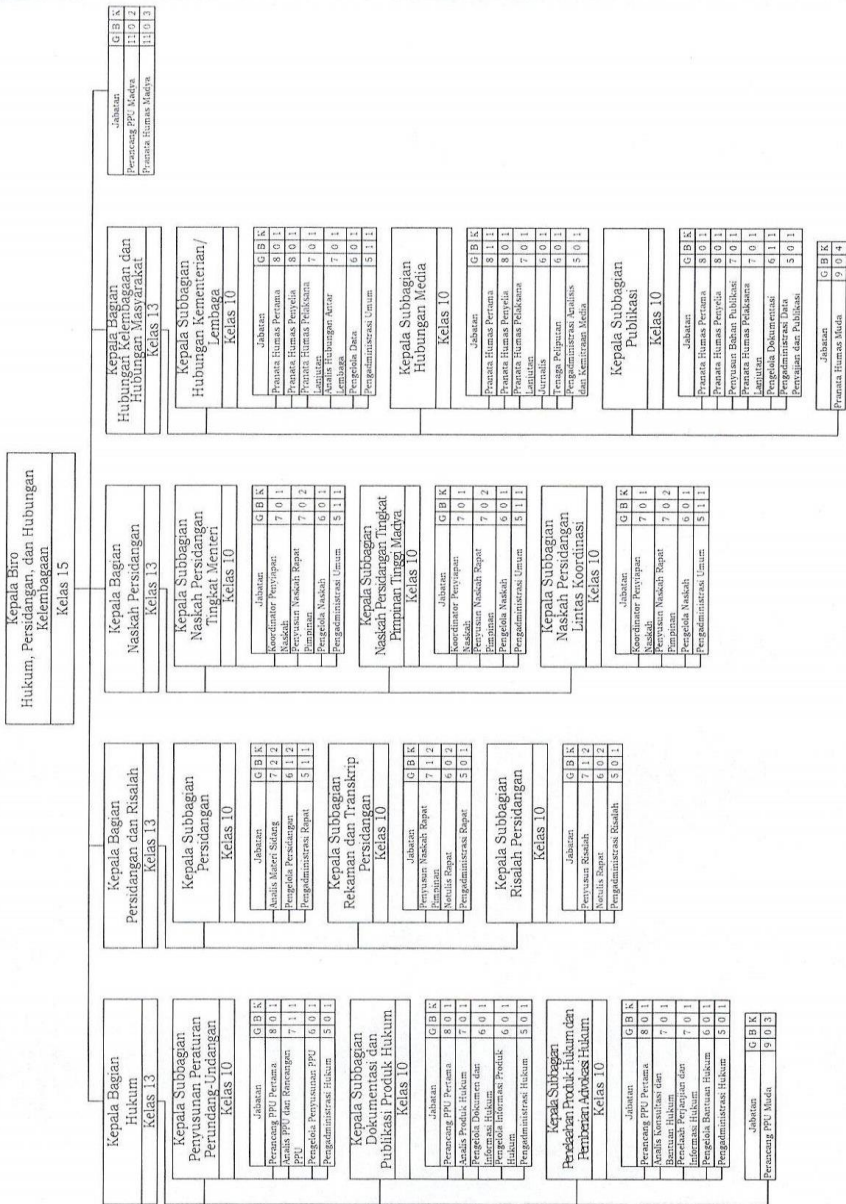


2. Peta Jabatan Biro Perencanaan dan Organisasi



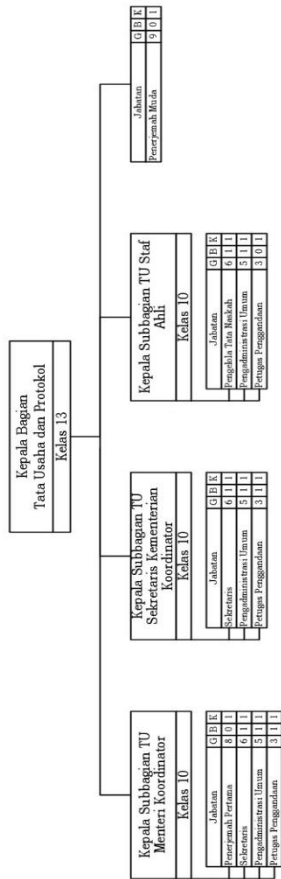


3. Peta Jabatan Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan

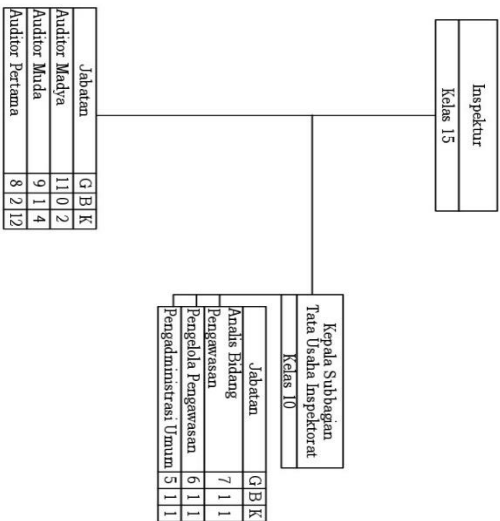




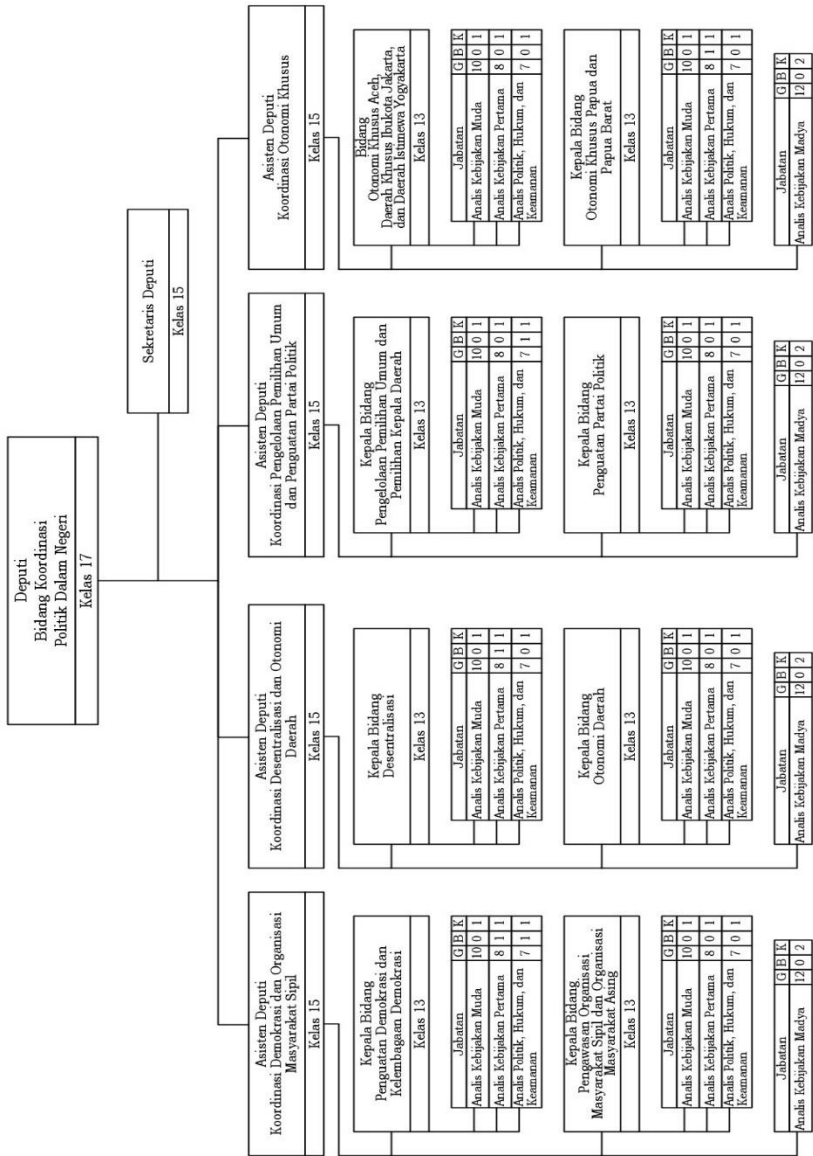
5. Peta Jabatan Tata Usaha Pimpinan



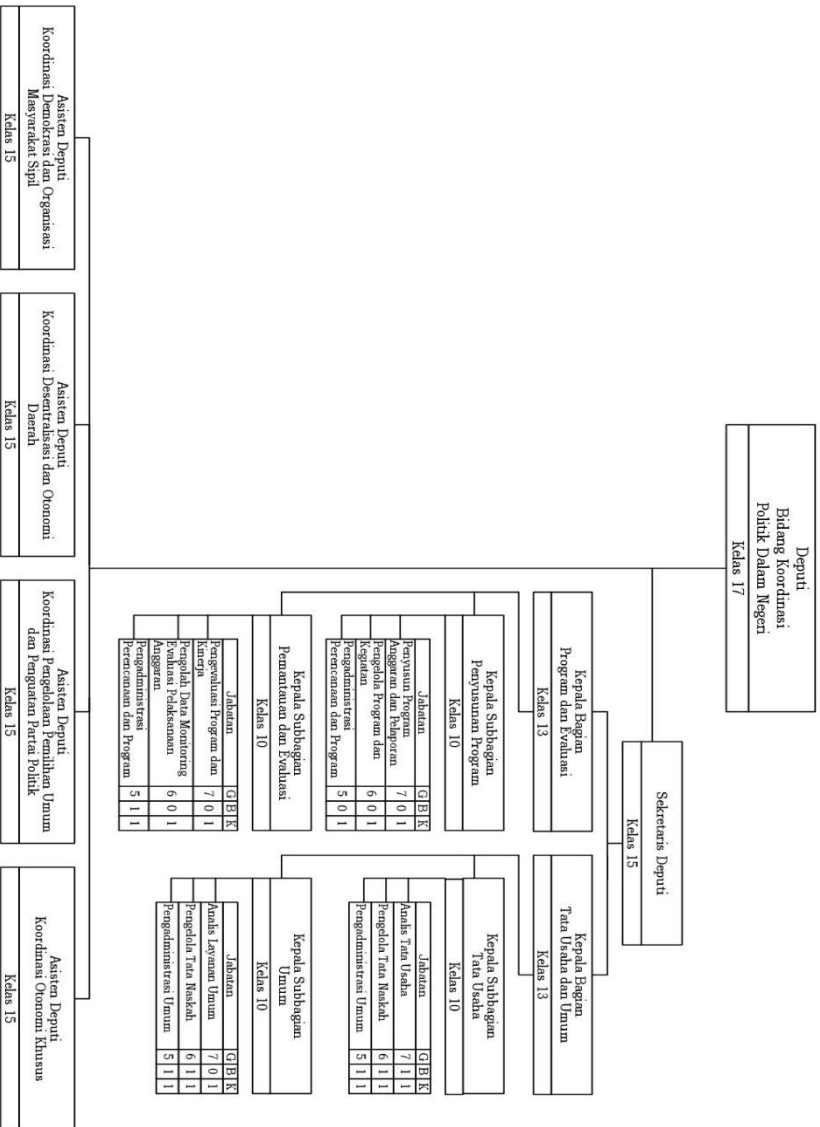
6. Peta Jabatan Inspektoral



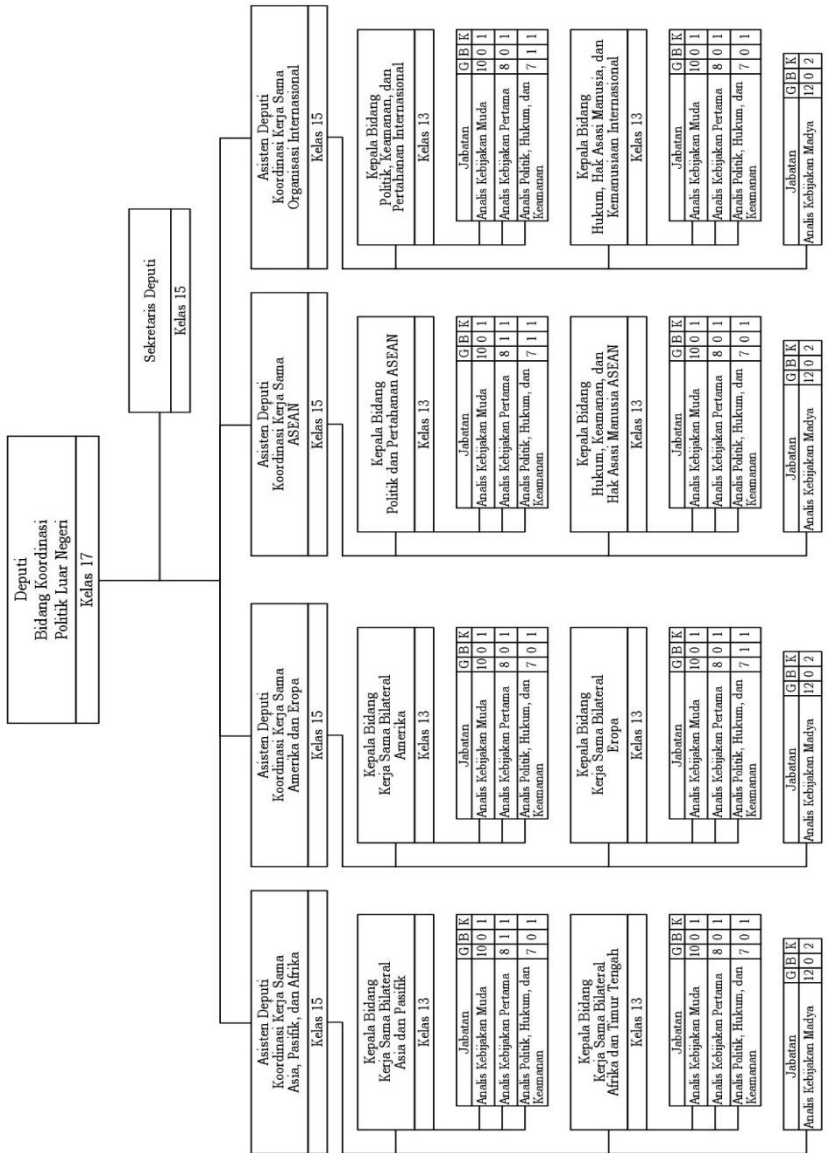
7. **Peta Jabatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**



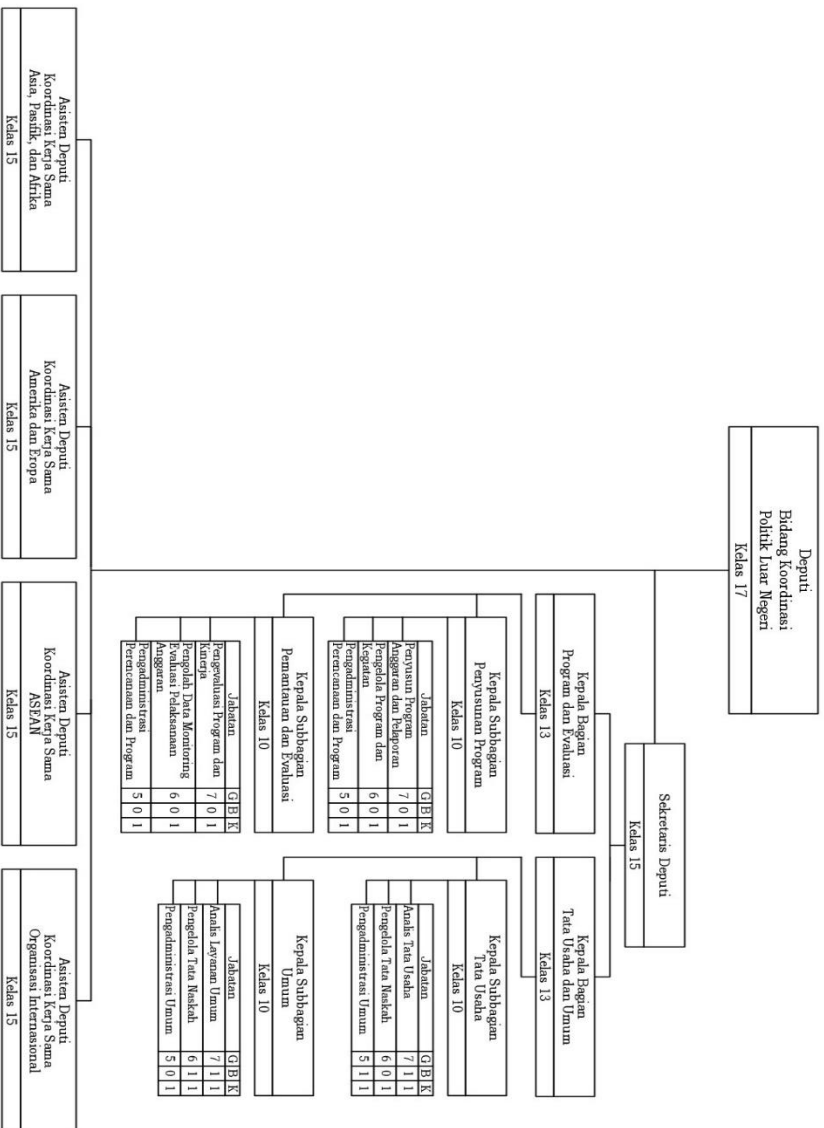
8. Peta Jabatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri



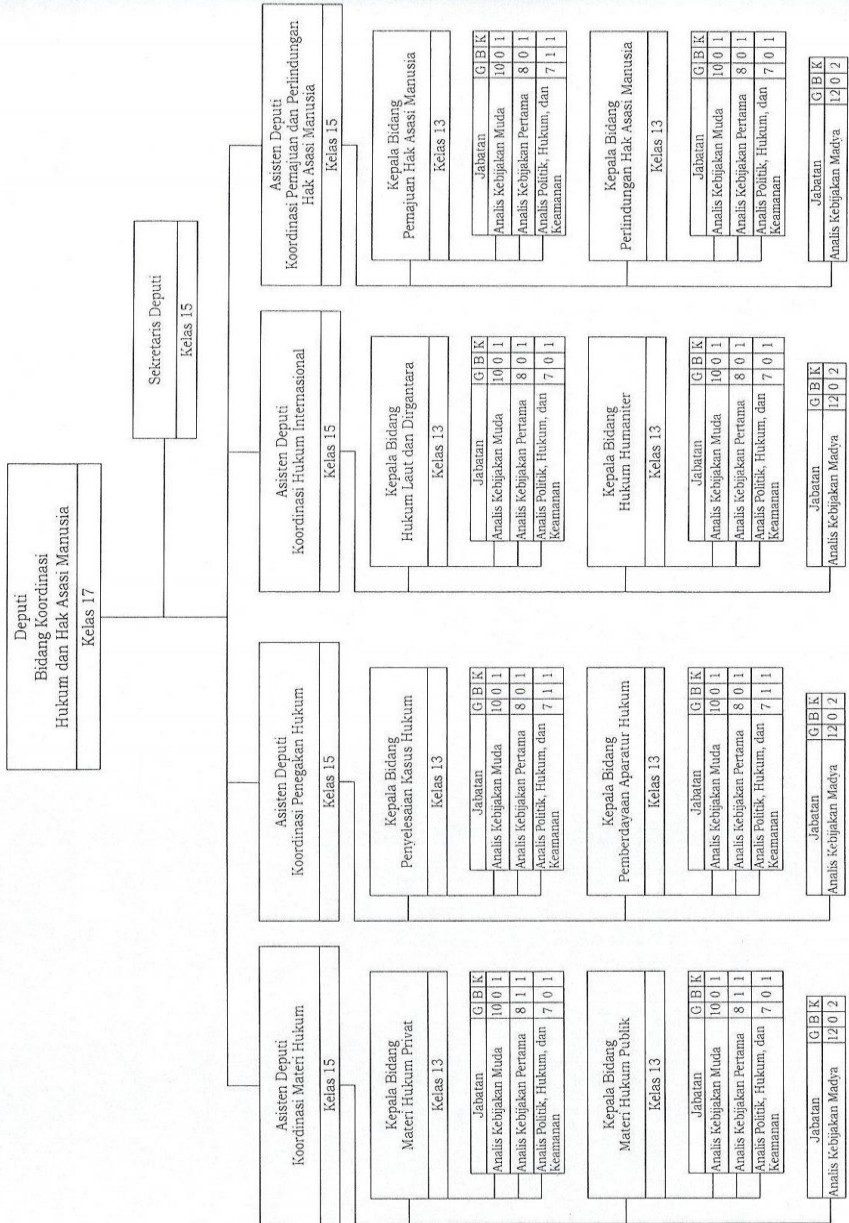
9. Peta Jabatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri



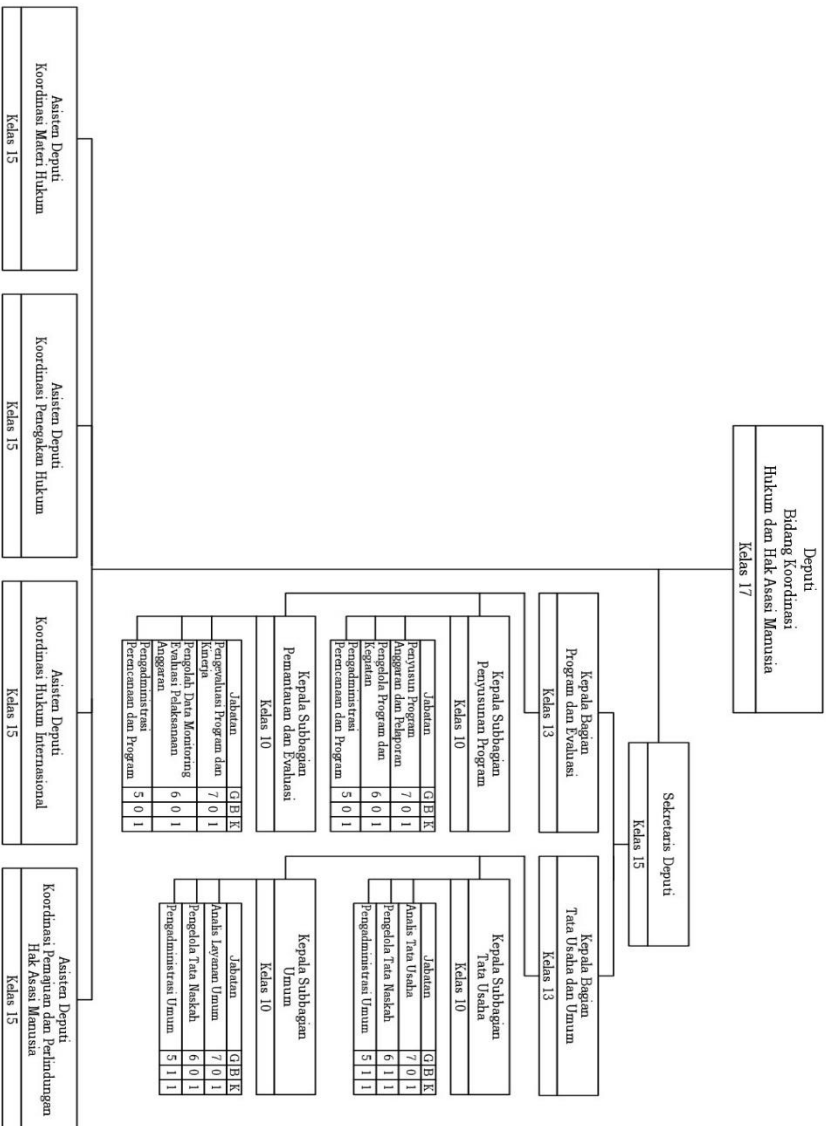
10. Peta Jabatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri



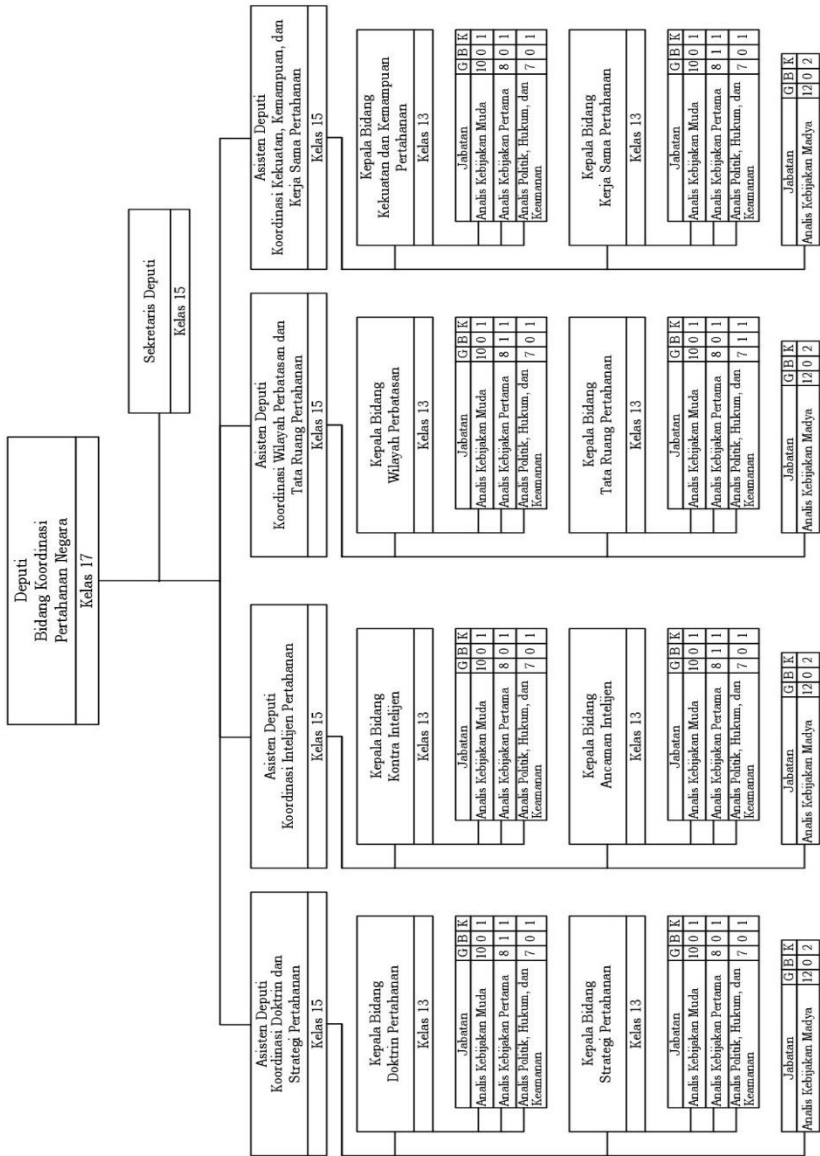
11. Peta Jabatan Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia



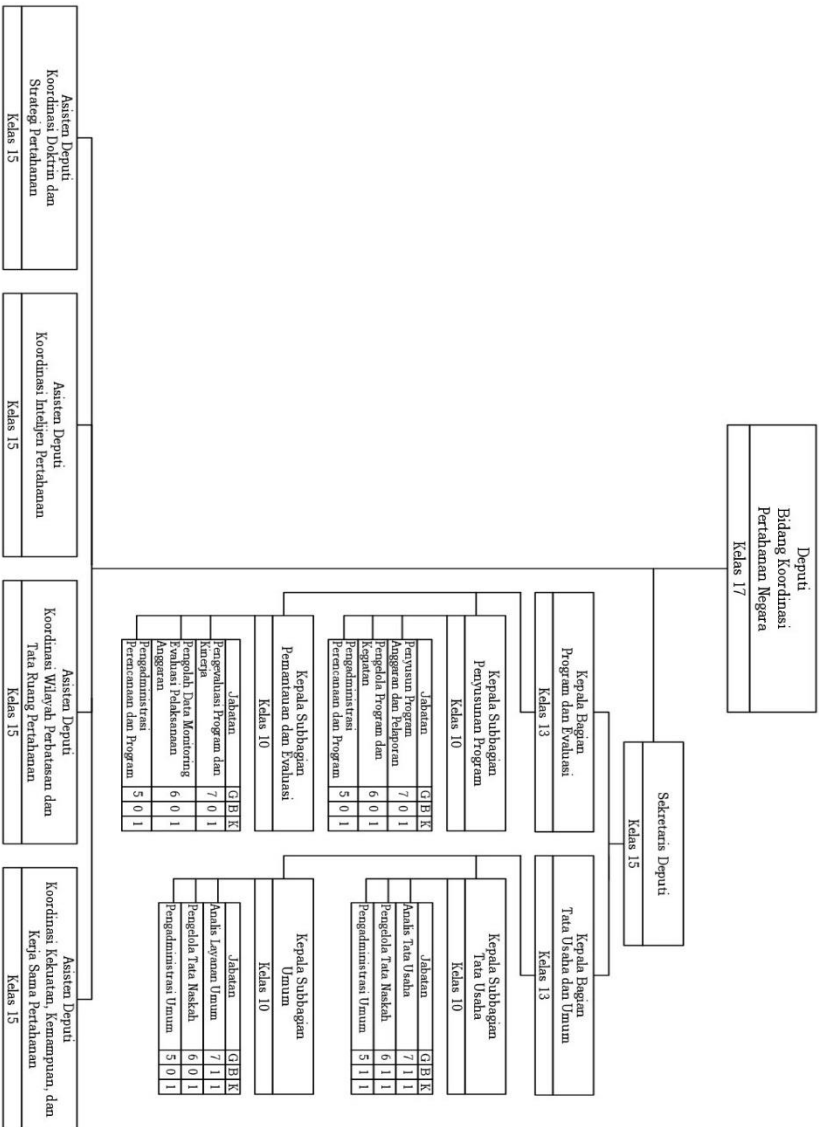
12. Peta Jabatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia



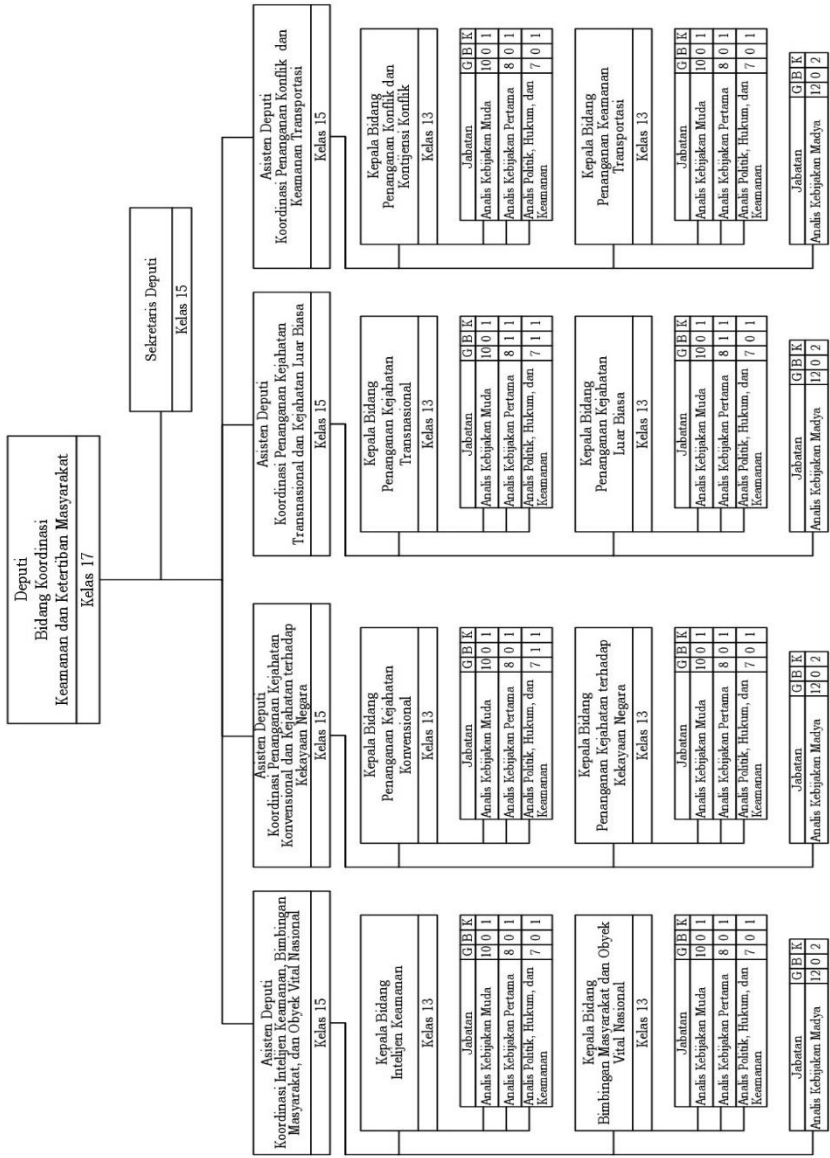
13. Peta Jabatan Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara



14. Peta Jabatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

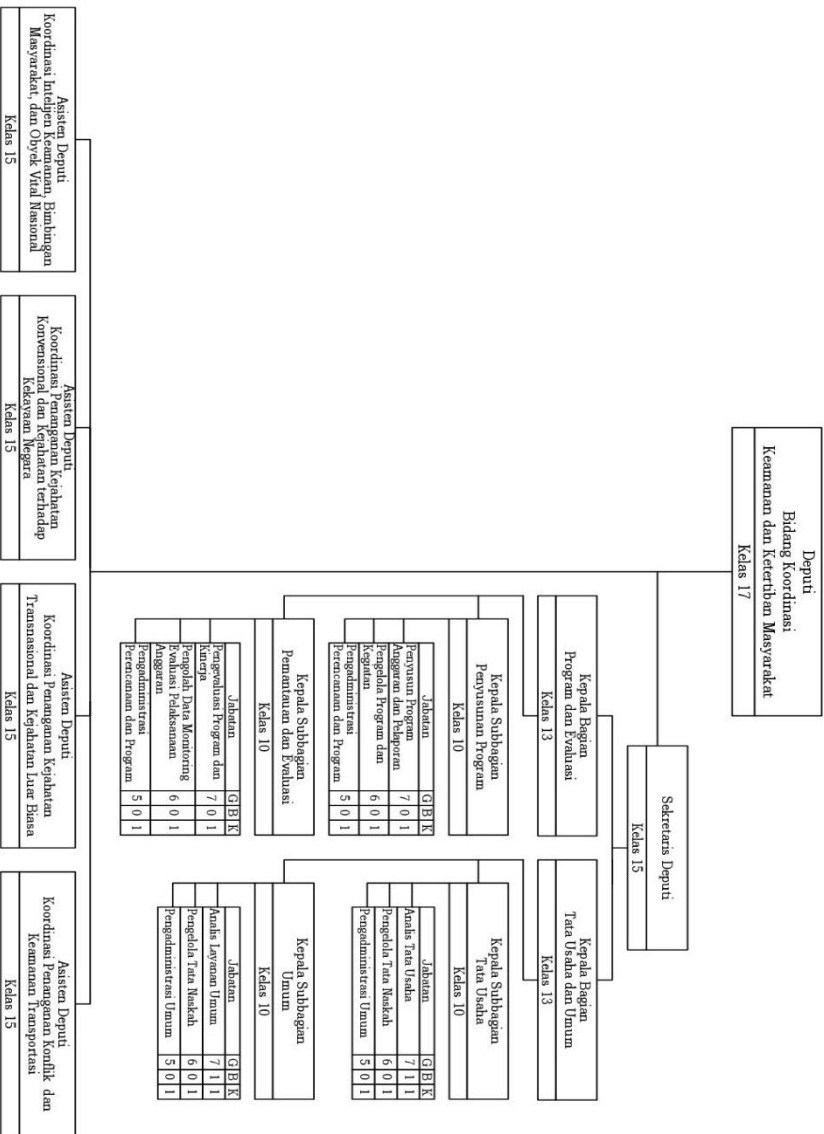


15. Peta Jabatan Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

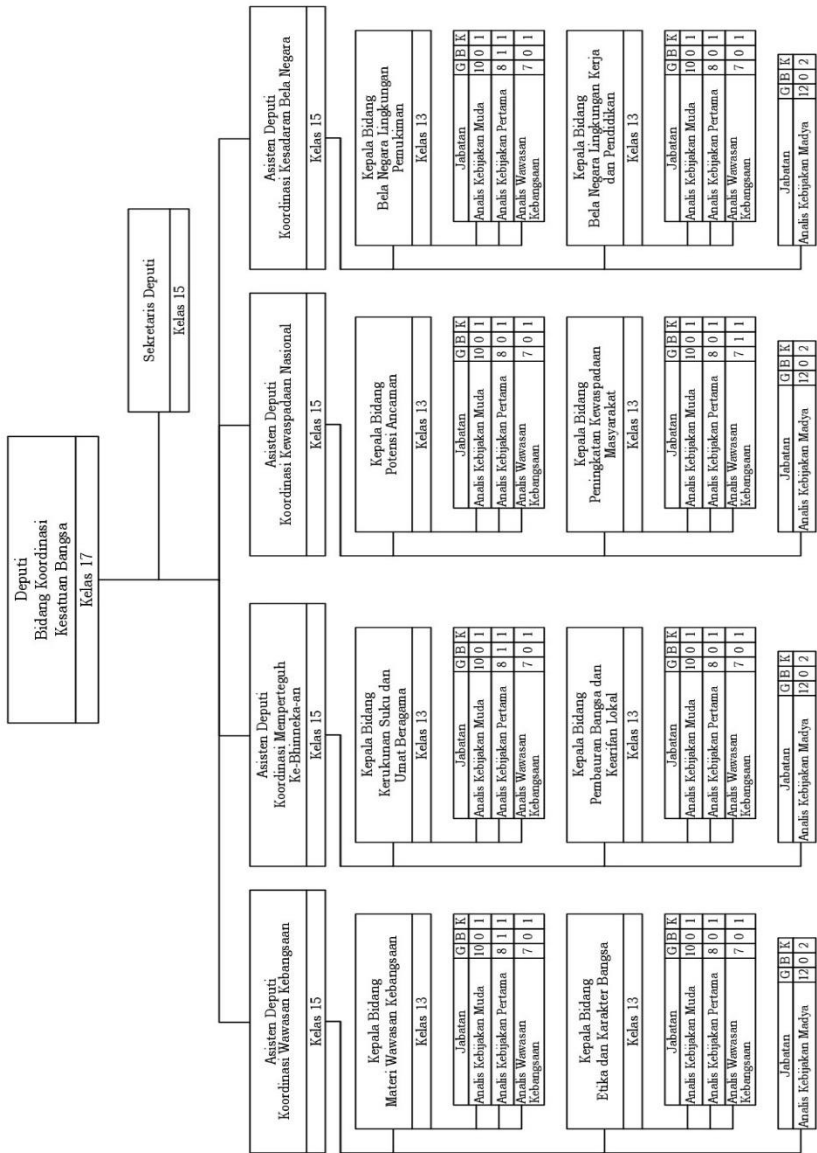




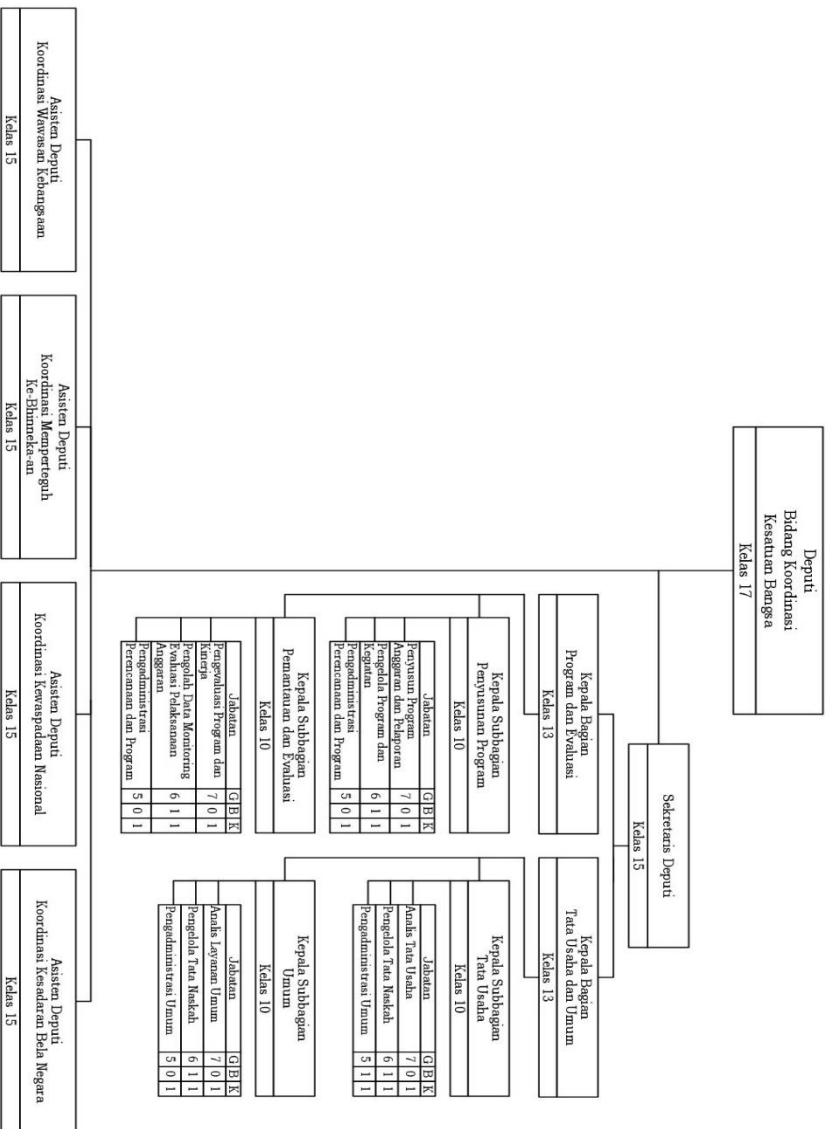
16. Peta Jabatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



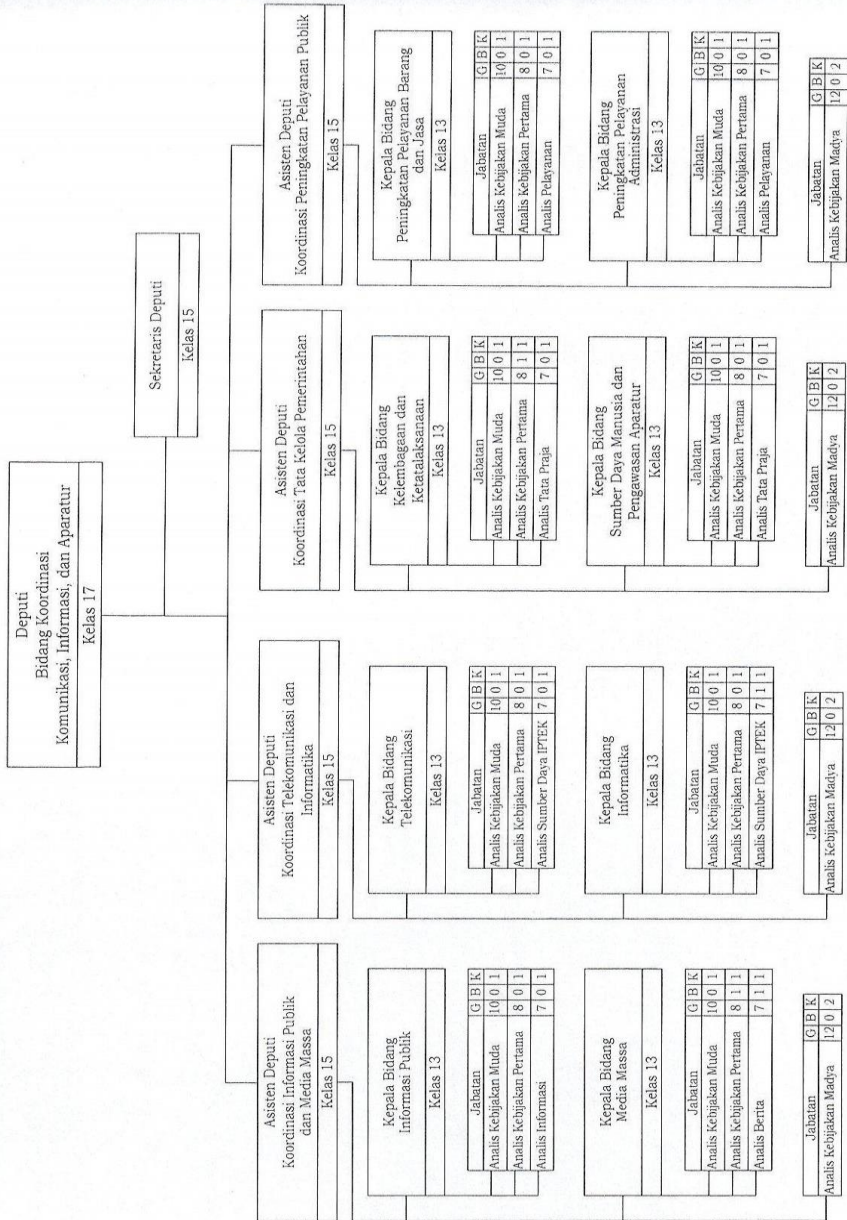
17. Peta Jabatan Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa



18. Peta Jabatan Sekretarisat Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan Bangsa

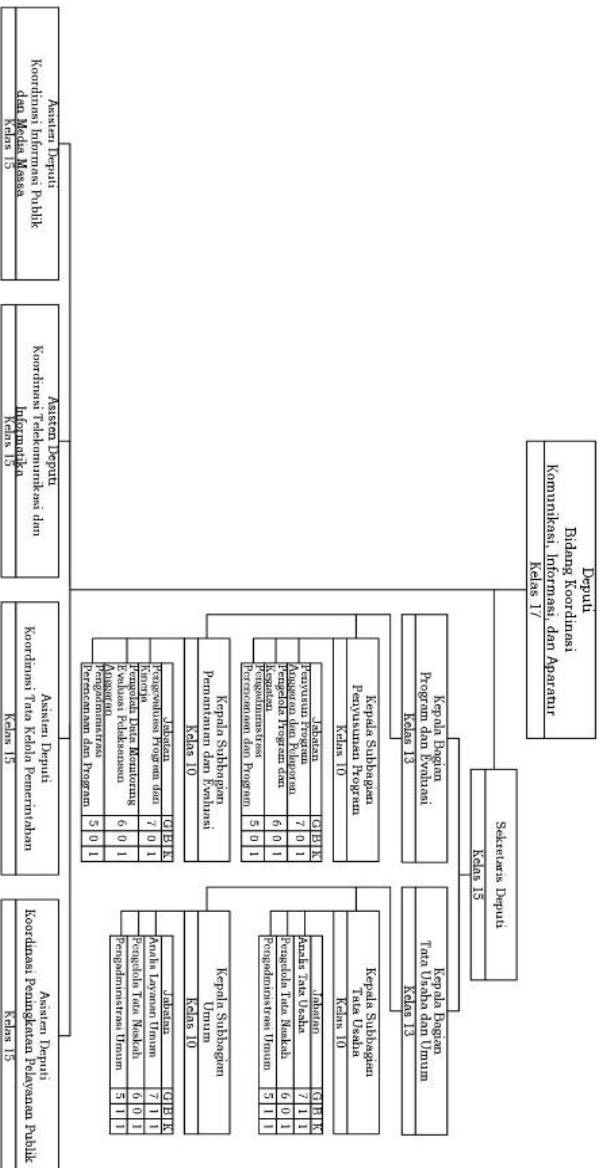


19. Peta Jabatan Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur





20. Peta Jabatan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,
ttd.

Sidiq Mustofa

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIRANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN
 DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

1. Daftar Nama Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Lainnya serta Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas			
1	Sekretaris Kementerian Koordinator	Sekretariat Kementerian Koordinator	17
2	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	Biro Perencanaan dan Organisasi	15
3	Kepala Bagian Perencanaan	Bagian Perencanaan	13
4	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I	Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I	10
5	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II	Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II	10



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
6	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III	Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III	10
7	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Bagian Evaluasi dan Pelaporan	13
8	Kepala Subbagian Pemantauan	Subbagian Pemantauan	10
9	Kepala Subbagian Evaluasi	Subbagian Evaluasi	10
10	Kepala Subbagian Pelaporan	Subbagian Pelaporan	10
11	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13
12	Kepala Subbagian Organisasi	Subbagian Organisasi	10
13	Kepala Subbagian Tata Laksana	Subbagian Tata Laksana	10
14	Kepala Subbagian Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Subbagian Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	10
15	Kepala Bagian Data dan Informasi	Bagian Data dan Informasi	13
16	Kepala Subbagian Data	Subbagian Data	10
17	Kepala Subbagian Sistem Informasi	Subbagian Sistem Informasi	10
18	Kepala Subbagian Perpustakaan	Subbagian Perpustakaan	10
19	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan	Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan	15



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
20	Kepala Bagian Hukum	Bagian Hukum	13
21	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	10
22	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum	Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum	10
23	Kepala Subbagian Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum	Subbagian Penelaahan Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum	10
24	Kepala Bagian Persidangan dan Risalah	Bagian Persidangan dan Risalah	13
25	Kepala Subbagian Persidangan	Subbagian Persidangan	10
26	Kepala Subbagian Rekaman dan Transkrip Persidangan	Subbagian Rekaman dan Transkrip Persidangan	10
27	Kepala Subbagian Risalah	Subbagian Risalah	10
28	Kepala Bagian Naskah Persidangan	Bagian Naskah Persidangan	13
29	Kepala Subbagian Naskah Persidangan Tingkat Menteri	Subbagian Naskah Persidangan Tingkat Menteri	10
30	Kepala Subbagian Naskah Persidangan Tingkat Pimpinan Tinggi Madya	Subbagian Naskah Persidangan Tingkat Pimpinan Tinggi Madya	10
31	Kepala Subbagian Naskah Persidangan Lintas Koordinasi	Subbagian Naskah Persidangan Lintas Koordinasi	10



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
32	Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Masyarakat	13
33	Kepala Subbagian Hubungan Kementerian/Lembaga	Subbagian Hubungan Kementerian/ Lembaga	10
34	Kepala Subbagian Hubungan Media	Subbagian Hubungan Media	10
35	Kepala Subbagian Publikasi	Subbagian Publikasi	10
36	Kepala Biro Umum	Biro Umum	15
37	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol	Bagian Tata Usaha dan Protokol	13
38	Kepala Subbagian Persuratan	Subbagian Persuratan	10
39	Kepala Subbagian Kearsipan	Subbagian Kearsipan	10
40	Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan	Subbagian Protokol dan Pengamanan	10
41	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator	Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator	10
42	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	10
43	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli	Subbagian Tata Usaha Staf Ahli	10
44	Kepala Bagian Kepegawaian	Bagian Kepegawaian	13



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
45	Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai	Subbagian Pengembangan Pegawai	10
46	Kepala Subbagian Mutasi dan Jabatan	Subbagian Mutasi dan Jabatan	10
47	Kepala Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	10
48	Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga	Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga	13
49	Kepala Subbagian Pengadaan	Subbagian Pengadaan	10
50	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Subbagian Rumah Tangga	10
51	Kepala Subbagian Barang Milik Negara	Subbagian Barang Milik Negara	10
52	Kepala Bagian Keuangan	Bagian Keuangan	13
53	Kepala Subbagian Administrasi Keuangan	Subbagian Administrasi Keuangan	10
54	Kepala Subbagian Perbendaharaan	Subbagian Perbendaharaan	10
55	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	10
56	Inspektur	Inspektorat	15
57	Kepala Subbagian Inspektorat	Subbagian Inspektorat	10
58	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	17
59	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	15



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
60	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	13
61	Kepala Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	10
62	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	10
63	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	13
64	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	10
65	Kepala Subbagian Umum, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Subbagian Umum, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	10
66	Asisten Deputy Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	Asisten Deputy Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil	15
67	Kepala Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi	Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi	13



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
68	Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing	Bidang Pengawasan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Masyarakat Asing	13
69	Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	15
70	Kepala Bidang Desentralisasi	Bidang Desentralisasi	13
71	Kepala Bidang Otonomi Daerah	Bidang Otonomi Daerah	13
72	Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik	Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik	15
73	Kepala Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Daerah	13
74	Kepala Bidang Penguatan Partai Politik	Bidang Penguatan Partai Politik	13
75	Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus	Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus	15
76	Kepala Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta	13
77	Kepala Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat	Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat	13



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
78	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	17
79	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	15
80	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	13
81	Kepala Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	10
82	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	10
83	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	13
84	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	10
85	Kepala Subbagian Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Subbagian Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	10



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
86	Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika	Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika	15
87	Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik	Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik	13
88	Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Afrika dan Timur Tengah	Bidang Kerja Sama Bilateral Afrika dan Timur Tengah	13
89	Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa	Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa	15
90	Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika	Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika	13
91	Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa	Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa	13
92	Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama <i>Association of Southeast Asian Nations</i> (ASEAN)	Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama ASEAN	15
93	Kepala Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN	Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN	13
94	Kepala Bidang Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia ASEAN	Bidang Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia ASEAN	13
95	Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional	Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Organisasi Internasional	15
96	Kepala Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional	Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional	13



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
97	Kepala Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kemanusiaan Internasional	Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kemanusiaan Internasional	13
98	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	17
99	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	15
100	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	13
101	Kepala Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	10
102	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	10
103	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	13



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
104	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	10
105	Kepala Subbagian Umum, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Subbagian Umum, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	10
106	Asisten Deputy Koordinasi Materi Hukum	Asisten Deputy Koordinasi Materi Hukum	15
107	Kepala Bidang Materi Hukum Privat	Bidang Materi Hukum Privat	13
108	Kepala Bidang Materi Hukum Publik	Bidang Materi Hukum Publik	13
109	Asisten Deputy Koordinasi Penegakan Hukum	Asisten Deputy Koordinasi Penegakan Hukum	15
110	Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum	Bidang Penyelesaian Kasus Hukum	13
111	Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum	Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum	13
112	Asisten Deputy Koordinasi Hukum Internasional	Asisten Deputy Koordinasi Hukum Internasional	15
113	Kepala Bidang Hukum Laut dan Dirgantara	Bidang Hukum Laut dan Dirgantara	13
114	Kepala Bidang Hukum Humaniter	Bidang Hukum Humaniter	13



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
115	Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	15
116	Kepala Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia	Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia	13
117	Kepala Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia	Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia	13
118	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	17
119	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	15
120	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	13
121	Kepala Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	10
122	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	10
123	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	13



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
124	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	10
125	Kepala Subbagian Umum, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Subbagian Umum, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	10
126	Asisten Deputy Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan	Asisten Deputy Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan	15
127	Kepala Bidang Doktrin Pertahanan	Bidang Doktrin Pertahanan	13
128	Kepala Bidang Strategi Pertahanan	Bidang Strategi Pertahanan	13
129	Asisten Deputy Koordinasi Intelijen Pertahanan	Asisten Deputy Koordinasi Intelijen Pertahanan	15
130	Kepala Bidang Kontra Intelijen	Bidang Kontra Intelijen	13
131	Kepala Bidang Ancaman Intelijen	Bidang Ancaman Intelijen	13
132	Asisten Deputy Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	Asisten Deputy Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	15
133	Kepala Bidang Wilayah Perbatasan	Bidang Wilayah Perbatasan	13
134	Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan	Bidang Tata Ruang Pertahanan	13
135	Asisten Deputy Koordinasi Kekuatan, Kemampuan,	Asisten Deputy Koordinasi Kekuatan,	15



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
	dan Kerja Sama Pertahanan	Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan	
136	Kepala Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan	Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan	13
137	Kepala Bidang Kerja Sama Pertahanan	Bidang Kerja Sama Pertahanan	13
138	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	17
139	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	15
140	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	13
141	Kepala Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10
142	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
143	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	13
144	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10
145	Kepala Subbagian Umum, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Subbagian Umum, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10
146	Asisten Deputy Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional	Asisten Deputy Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional	15
147	Kepala Bidang Intelijen Keamanan	Bidang Intelijen Keamanan	13
148	Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional	Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional	13
149	Asisten Deputy Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	Asisten Deputy Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	15
150	Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional	Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional	13



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
151	Kepala Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	13
152	Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	15
153	Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional	Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional	13
154	Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa	Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa	13
155	Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	15
156	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik	Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik	13
157	Kepala Bidang Penanganan Keamanan Transportasi	Bidang Penanganan Keamanan Transportasi	13
158	Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	17
159	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	15
160	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	13



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
161	Kepala Subbagian Penyesunan Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Subbagian Penyesunan Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	10
162	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	10
163	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	13
164	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	10
165	Kepala Subbagian Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Subbagian Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	10
166	Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan	15
167	Kepala Bidang Materi Wawasan Kebangsaan	Bidang Materi Wawasan Kebangsaan	13
168	Kepala Bidang Etika dan Karakter Bangsa	Bidang Etika dan Karakter Bangsa	13
169	Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an	Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Ke-Bhinneka-an	15



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
170	Kepala Bidang Kerukunan Suku dan Umat Beragama	Bidang Kerukunan Suku dan Umat Beragama	13
171	Kepala Bidang Pembauran Bangsa dan Kearifan Lokal	Bidang Pembauran Bangsa dan Kearifan Lokal	13
172	Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional	15
173	Kepala Bidang Potensi Ancaman	Bidang Potensi Ancaman	13
174	Kepala Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat	Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat	13
175	Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara	15
176	Kepala Bidang Bela Negara Lingkungan Pemukiman	Bidang Bela Negara Lingkungan Pemukiman	13
177	Kepala Bidang Bela Negara Lingkungan Kerja dan Pendidikan	Bidang Bela Negara Lingkungan Kerja dan Pendidikan	13
178	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	17
179	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	15
180	Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi	Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang	13



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
	Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	
181	Kepala Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Subbagian Penyusunan Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	10
182	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Subbagian Pemantauan dan Evaluasi, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	10
183	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Bagian Tata Usaha dan Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	13
184	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	10
185	Kepala Subbagian Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	Subbagian Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	10
186	Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa	Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa	15
187	Kepala Bidang Informasi Publik	Bidang Informasi Publik	13



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
188	Kepala Bidang Media Massa	Bidang Media Massa	13
189	Asisten Deputy Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	Asisten Deputy Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	15
190	Kepala Bidang Telekomunikasi	Bidang Telekomunikasi	13
191	Kepala Bidang Informatika	Bidang Informatika	13
192	Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	Asisten Deputy Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	15
193	Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	13
194	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Aparatur	Bidang Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Aparatur	13
195	Asisten Deputy Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	Asisten Deputy Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	15
196	Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa	Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa	13
197	Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan Administrasi	Bidang Peningkatan Pelayanan Administrasi	13
198	Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi	Staf Ahli	16
199	Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional	Staf Ahli	16



NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN
1	2	3	4
200	Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman	Staf Ahli	16
201	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi	Staf Ahli	16
202	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Staf Ahli	16
Jabatan Lainnya			
203	Staf Khusus Bidang Politik dan Pemerintahan	Staf Khusus	16
204	Staf Khusus Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	Staf Khusus	16
205	Staf Khusus Bidang Ekonomi dan Moneter	Staf Khusus	16

2. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana serta Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
Jabatan Fungsional		
1	Analisis Kebijakan Madya	12
2	Analisis Kepegawaian Madya	11
3	Arsiparis Madya	11
4	Auditor Madya	11



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
5	Dokter Madya	12
6	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Madya	11
7	Perancang Peraturan Perundang-undangan (PPU) Madya	11
8	Perawat Madya	11
9	Perencana Madya	11
10	Pranata Humas Madya	11
11	Pranata Komputer Madya	11
12	Pustakawan Madya	11
13	Analisis Kebijakan Muda	10
14	Analisis Kepegawaian Muda	9
15	Arsiparis Muda	9
16	Auditor Muda	9
17	Dokter Muda	10
18	Penerjemah Muda	9
19	Pengelola PBJ Muda	9
20	Perancang PPU Muda	9
21	Perawat Muda	9
22	Perencana Muda	9
23	Pranata Humas Muda	9
24	Pranata Komputer Muda	9
25	Pustakawan Muda	9
26	Analisis Kebijakan Pertama	8
27	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
28	Analisis Kepegawaian Pertama	8



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
29	Arsiparis Penyelia	8
30	Arsiparis Pertama	8
31	Auditor Pertama	8
32	Dokter Pertama	9
33	Penerjemah Pertama	8
34	Pengelola PBJ Pertama	8
35	Perancang PPU Pertama	8
36	Perawat Penyelia	8
37	Perawat Pertama	8
38	Perencana Pertama	8
39	Pranata Humas Penyelia	8
40	Pranata Humas Pertama	8
41	Pranata Komputer Penyelia	8
42	Pranata Komputer Pertama	8
43	Pustakawan Penyelia	8
44	Pustakawan Pertama	8
45	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
46	Arsiparis Mahir	7
47	Perawat Pelaksana Lanjutan	7
48	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	7
49	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
50	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
51	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
52	Arsiparis Terampil	6
53	Perawat Terampil	6



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
54	Pustakawan Pelaksana	6
Jabatan Pelaksana		
55	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7
56	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	7
57	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7
58	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7
59	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
60	Analisis Perencanaan Strategis	7
61	Analisis Sistem Informasi	7
62	Koordinator Penyiapan Naskah	7
63	Analisis Berita	7
64	Analisis Bidang Pengawasan	7
65	Analisis Data dan Informasi	7
66	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7
67	Analisis Informasi	7
68	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	7
69	Analisis Kelembagaan	7
70	Analisis Keuangan	7
71	Analisis Laporan Keuangan	7
72	Analisis Layanan Umum	7
73	Analisis Materi Sidang	7
74	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7
75	Analisis Pelayanan	7
76	Analisis Perbendaharaan	7
77	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	7



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
78	Analisis Politik, Hukum, dan Keamanan	7
79	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
80	Analisis Produk Hukum	7
81	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
82	Analisis Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	7
83	Analisis Tata Praja	7
84	Analisis Tata Usaha	7
85	Analisis Wawasan Kebangsaan	7
86	Penata Laporan Keuangan	7
87	Penelaah Perjanjian dan Informasi Hukum	7
88	Pengawas Perpustakaan	7
89	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7
90	Penyuluh Kearsipan	7
91	Penyusun Bahan Publikasi	7
92	Penyusun Laporan Kebijakan	7
93	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7
94	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
95	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga Perlengkapan	7
96	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7
97	Penyusun Risalah	7
98	Jurnalis	6
99	Koordinator Pergudangan	6



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
100	Notulis Rapat	6
101	Pengelola Akuntansi	6
102	Pengelola Bahan Perencanaan	6
103	Pengelola Bantuan Hukum	6
104	Pengelola Barang Milik Negara	6
105	Pengelola Data	6
106	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6
107	Pengelola Dokumentasi	6
108	Pengelola Gaji	6
109	Pengelola Informasi Produk Hukum	6
110	Pengelola Kegiatan	6
111	Pengelola Kepegawaian	6
112	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6
113	Pengelola Naskah	6
114	Pengelola Pengawasan	6
115	Pengelola Perpustakaan	6
116	Pengelola Persidangan	6
117	Pengelola Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	6
118	Pengelola Program dan Laporan	6
119	Pengelola Program dan Kegiatan	6
120	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6
121	Pengelola Sistem Informasi	6
122	Pengelola Surat	6
123	Pengelola Tata Naskah	6



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
124	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6
125	Pengolah Data	6
126	Pengolah Data Kelembagaan	6
127	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	6
128	Pranata Acara	6
129	Pranata Kearsipan	6
130	Sekretaris	6
131	Tenaga Peliputan	6
132	Verifikator Keuangan	6
133	Komandan Petugas Keamanan	5
134	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	5
135	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5
136	Pengadministrasi Hukum	5
137	Pengadministrasi Kepegawaian	5
138	Pengadministrasi Keuangan	5
139	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5
140	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5
141	Pengadministrasi Perpustakaan	5
142	Pengadministrasi Persuratan	5
143	Pengadministrasi Rapat	5
144	Pengadministrasi Risalah	5
145	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
146	Pengadministrasi Umum	5



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3
147	Pengemudi	4
148	Petugas Protokol	5
149	Teknisi Sarana dan Prasarana	5
150	Petugas Keamanan	4
151	Petugas Pengandaan	3

MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,

ttd.

Sidiq Mustofa

